

Perempuan dan Kebangsaan

Catatan Jurnal Perempuan
Perempuan dan Kebangsaan

Artikel

Kebangkitan Para "Ibu Bangsa" Sejak Masa Pergerakan Anti Kolonial Hingga Awal Kemerdekaan Indonesia
Siti Utami Dewi Ningrum

Perempuan dalam Film Indonesia Tentang "Indonesia Timur"
Meike Lusye Karolus

Bias Gender dalam Historiografi Indonesia dan Penulisan Sejarah Perempuan
Mutiah Amini

Ibuisme Islam Politik dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2017
Lelly Andriasanti

Negosiasi dan Otonomi Istri Mantan Narapidana Terorisme
Fitria Sari

Rekonstruksi Pemahaman Kebangsaan: Percakapan Tentang Perempuan dan Kebangsaan
Ruth Indiah Rahayu dan Iqraa Runi Aprilia

Diterbitkan oleh:

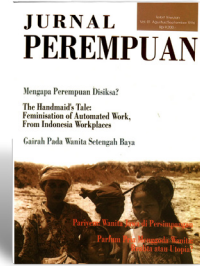
YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 748/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya beroleh kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **www.jurnalperempuan.org**

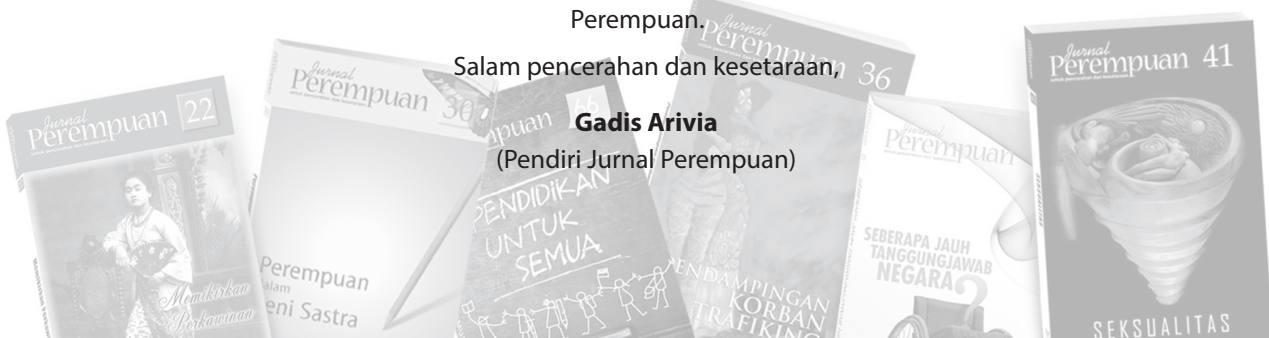
Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295, email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

DIREKTUR EKSEKUTIF

Dr. Atnike Nova Sigirowati

PEMIMPIN REDAKSI

Anita Dhewy, M.Si.

DEWAN REDAKSI

Dr. Atnike Nova Sigirowati, M.Sc. (Pascasarjana Diplomasi, Universitas Paramadina)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universiteit van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum. (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)

Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)
Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen dan Feminisme, Appalachian State University, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi, M.Si.

SEKRETARIS REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu, M.Hum.

REDAKSI

Bella Sandiata, M.H.
Iqraa Runi Aprilia

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Gery Andri Wibowo
Hasan Ramadhan

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

indonesianfeministjournal.org

Cetakan Pertama, Agustus 2018

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Kebangsaan/Women and Nationalismiii

Artikel / Articles

- Kebangkitan Para "Ibu Bangsa" Sejak Masa Pergerakan Anti Kolonial Hingga Awal Kemerdekaan Indonesia / *The Revival of the "Mothers of the Nation" from the Period of Anti Colonial Movement until the Independence of Indonesia* 129-141
Siti Utami Dewi Ningrum
- Perempuan dalam Film Indonesia Tentang "Indonesia Timur" / *Women in Indonesian Films about "Eastern Indonesia"* 143-152
Meike Lusye Karolus
- Bias Gender dalam Historiografi Indonesia dan Penulisan Sejarah Perempuan / *Gender Bias in Historiography of Indonesia and the Writing of Women's History* 153-160
Mutiah Amini
- Ibuisme Islam Politik dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2017 / *Ibuisms of Political Islam in the Election of Jakarta Governor in 2017* 161-171
Lelly Andriasanti
- Negosiasi dan Otonomi Istri Mantan Narapidana Terorisme / *Negotiation and Autonomy of the Wives of Former Convicted Terrorists* 173-182
Fitria Sari
- Rekonstruksi Pemahaman Kebangsaan: Percakapan Tentang Perempuan dan Kebangsaan / *Reconstructing the Notion of Nationalism: Conversations About Women and Nationalism* 183-192
Ruth Indah Rahayu dan Iqraa Runi Aprilia

Perempuan dan Kebangsaan *Women and Nationalism*

P roklamasi 1945 telah dideklarasikan tujuh puluh tiga tahun silam, tetapi hari ini kita masih menghadapi problem kebangsaan. Reformasi 1998 yang membuka pintu bagi berbagai ideologi turut memberi jalan bagi kekuatan konservatif agama dan gerakan purifikasi identitas untuk bangkit dan berkembang. Gerakan ini tumbuh seiring dengan menguatnya gagasan dominasi atas perempuan dan kelompok marginal. Sementara bila kita melihat kembali gagasan Indonesia sebagai negara-bangsa, ia dibangun atas dasar konsepsi anticolonialisme artinya konsepsi tentang Indonesia adalah sebagai komunitas politik. Meskipun demikian fakta sosiologis terkait keberagaman identitas kultural sejak awal telah diakui dan diterima. Bahkan jika kita kaji lebih lanjut, kita dapat menemukan peran dan gagasan penting gerakan perempuan atas ide kebangsaan. Susan Blackburn (2007) mencatat kongres nasional pertama organisasi-organisasi perempuan yang diadakan di Yogyakarta pada Desember 1928 secara jelas mengisyaratkan orientasi nasionalisnya. Pidato yang disampaikan Sitti Soendari salah satu tokoh perempuan di kongres tersebut, tentang "Kewajiban dan Cita-Cita Putri Indonesia" telah membicarakan ide kebangsaan dalam kerangka keberagaman. Ia mengimajinasikan Indonesia sebagai taman bunga yang luas yang berisi berbagai jenis bunga yang terlihat indah ketika bersama. Akan tetapi ide ini berubah ketika Indonesia merdeka dan menjadi negara, dimana negara bukan dianggap sebagai taman bunga melainkan keluarga. Sementara ide tentang keluarga dan negara adalah kumpulan orang yang memiliki pemimpin, sehingga makna kebangsaan kemudian bergeser (Ruth I Rahayu 2017).

Situasi ini mendorong *Jurnal Perempuan* membuka ruang percakapan untuk mendiskusikan politik perempuan dalam menanggapi problem kebangsaan dan agensi perempuan dalam mentransformasi kebangsaan-Indonesia hingga dewasa ini. Ruang percakapan ini sangat penting bagi perempuan dan kelompok marginal lainnya, karena konsep dan nilai kebangsaan kerap mengatasnamakan kepentingan perempuan. Meskipun yang terjadi justru sebaliknya. Misalnya, dua puluh tahun reformasi justru diisi dengan munculnya peraturan daerah (Perda) yang diskriminatif terhadap perempuan dengan mengatasnamakan moralitas dan agama yang ironisnya dalam proses penyusunannya juga didukung dan/atau diusung oleh partai politik nasionalis/sekuler. Pelabelan negatif terhadap kelompok yang dianggap

berbeda masih sering terjadi, baik terhadap hal keyakinan atau aliran kepercayaan; orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender; maupun pilihan dan afiliasi politik. Tak jarang pelabelan negatif ini kemudian mengarah pada tindakan persekusi. Kondisi ini tentu tidak hanya mengancam kehidupan perempuan dan kelompok marginal, tetapi juga konsensus kebangsaan dan kehidupan demokrasi.

Para sarjana feminis mengkritik diabaikannya perempuan dan gender dalam kajian tentang kebangsaan. Mereka mengkaji nasionalisme/kebangsaan dengan dua pendekatan utama: pertama melalui pemeriksaan terhadap peran perempuan dalam gerakan kebangsaan, kedua lewat pengembangan teori dalam menganalisis cara-cara 'bangsa' didasarkan pada identitas dan makna gender tertentu (Ranchod-Nilsson & Tetreault 2000). Lebih jauh para feminis juga berfokus pada cara-cara perempuan bukan hanya menjadi simbol wacana kebangsaan dalam hal konstruksi bangsa dan gender, tetapi juga mampu merestrukturisasi proyek-proyek kebangsaan untuk memasukkan tujuan feminis (Vickers 2006 dikutip dalam Kaufman & Williams 2011).

Riset *Jurnal Perempuan* yang mengupas percakapan perempuan atau feminis tentang kebangsaan mengungkap bahwa perempuan selalu menjadi alat mobilisasi kebangsaan, meskipun perempuan memiliki kepentingan yang "independen" terhadap kebangsaan. Namun demikian kepentingan perempuan tersebut dipandang sebelah mata oleh aktor-aktor politik yang mengelola negara. Di sisi lain upaya mobilisasi dan politisasi perempuan juga digunakan untuk menolak ide kebangsaan dan menyebarkan gagasan radikal-fundamentalis seperti temuan kajian tentang pemilihan Gubernur Jakarta 2017. Selain itu, artikel-artikel dalam edisi ini juga menunjukkan bahwa penulisan sejarah dan narasi perempuan terkait tema kebangsaan baik dalam bentuk kajian akademis maupun budaya populer (film) juga masih diwarnai adanya bias gender, kelas, ras, etnis, agama, dll. Untuk itu dibutuhkan pendekatan interseksional agar dapat menangkap dan memahami gagasan, jejak dan aktivitas perempuan dalam memaknai dan menghidupi konsep kebangsaan. Sementara itu sepanjang sejarah perjalanan kebangsaan dari awal munculnya gagasan kebangsaan hingga hari ini perempuan telah dan masih bergelut dan bekerja dalam aktivitas sehari-hari di ranah kewargaan untuk membangun masyarakat warga dan mereproduksi kebangsaan. (Anita Dhewy)

Siti Utami Dewi Ningrum (Program Studi S2 Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
Indonesia)

**Kebangkitan Para “Ibu Bangsa” Sejak Masa Pergerakan
Anti Kolonial Hingga Awal Kemerdekaan Indonesia**

***The Revival of the “Mothers of the Nation” from the Period of
Anti Colonial Movement until the Independence of Indonesia***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 3, Agustus 2018, hal. 129-141, 8 gambar,
38 daftar pustaka

“Mothers of the Nation” or *ibuism* is a term that is often considered negative in the study of women’s history. This is related to the nation’s political journey, during which the New Order regime took power, the terminology was used to control and dominate women in Indonesia. Further explored, in the 1920s, the spirit of nationalism are grew, including among the (*priayi*) noble women. They formed an association and held the Indonesian Women’s Congress I in 1928. According to Susan Blackburn, what women did at the time was their nationalistic form, becoming “Mothers of the Nation.” Using a historical approach, this paper seeks to retrace how early noble women came into existence and formulated their ideas of nationalism. The sources used are the result of literature studies, whether magazines, books, scientific papers, memoirs or biographies of women movement. This paper also use oral and photo sources to complete the experiences of women who involved in this topic.

Keywords: mothers of the nation, women’s history, nationalism, noble women

“Ibu Bangsa” atau *ibuisme* merupakan terminologi yang sering kali dianggap bermakna negatif dalam kajian tentang sejarah perempuan. Hal ini berkaitan dengan perjalanan politik bangsa, di mana saat rezim Orde Baru berkuasa, terminologi tersebut digunakan untuk mengontrol dan mendomestikasi perempuan di Indonesia. Jika ditelusuri lebih jauh, pada tahun 1920-an, semangat kebangsaan semakin membara, termasuk di kalangan perempuan *priayi*. Mereka membentuk perkumpulan hingga mengadakan Kongres Perempuan Indonesia I tahun 1928. Menurut Susan Blackburn, yang dilakukan oleh para perempuan saat itu adalah bentuk nasionalisme mereka, menjadi “Ibu Bangsa”. Menggunakan pendekatan sejarah, tulisan ini berusaha merunut kembali bagaimana perempuan *priayi* mula-mula hadir dan merumuskan idenya tentang semangat berkebangsaan. Sumber-sumber yang digunakan merupakan hasil dari studi pustaka, baik majalah, buku, karya ilmiah, memoar maupun biografi para perempuan pergerakan. Digunakan pula sumber lisan dan foto untuk dapat melengkapi pengalaman perempuan yang terlibat dalam tema tulisan ini.

Kata kunci: ibu bangsa, sejarah perempuan, nasionalisme, perempuan *priayi*

Meike Lusye Karolus (Pusat Studi Sosial Asia Tenggara,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia)

**Perempuan dalam Film Indonesia Tentang
“Indonesia Timur”**

Women in Indonesian Films about “Eastern Indonesia”

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 3, Agustus 2018, hal. 143-152, 4 gambar,
36 daftar pustaka

The purpose of this study is to explain about women’s positions and roles that are represented in films as agents who frame identity and ethnical stereotype of “the East”. By using intersectional feminist perspective, the study analyse texts from three Indonesian films which using film sets in the regions of Eastern Indonesia as follows: *Aisyah: Let Us Be a Family* (2016), *Salawaku* (2016), and *Marlina, the Murderer in Four Acts* (2017). Findings show that films about Eastern Indonesia still embed with the perspectives of orientalism and colonialism. Women from non-Eastern Indonesia are commonly represented to having superior positions and important roles in educating and spreading the feeling of nationalism. On the other hand, Eastern Indonesian women are mostly represented inferior and alienated from their communities and nature.

Keywords: film, representation, orientalism, colonialism, intersectionality

Tulisan ini bertujuan menjelaskan posisi dan peran perempuan yang direpresentasikan dalam film sebagai agen yang membingkai identitas dan stereotip etnis “Timur”. Dengan menggunakan perspektif feminis interseksional, penelitian ini menganalisis teks-teks dari tiga film Indonesia yang berlokasi di wilayah Indonesia Timur, yaitu *Aisyah: Biarkan Kami Bersaudara* (2016), *Salawaku* (2016), dan *Marlina, Si Pembunuh dalam 4 Babak* (2017). Hasilnya, film-film tentang Indonesia Timur masih melekat dengan perspektif orientalisme dan kolonialisme. Perempuan dari non Indonesia Timur direpresentasikan memiliki posisi yang lebih superior dan berperan penting dalam mengedukasi dan menyebarkan rasa nasionalisme. Di sisi lain, perempuan Indonesia Timur direpresentasikan inferior dan terasing dari komunitas dan alamnya.

Kata kunci: film, representasi, orientalisme, kolonialisme, interseksionalitas

Mutiah Amini (Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia)

**Bias Gender dalam Historiografi Indonesia dan
Penulisan Sejarah Perempuan**

***Gender Bias in Historiography of Indonesia and
the Writing of Women’s History***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 3, Agustus 2018, hal. 153-160, 30 daftar
pustaka

This paper discusses gender bias within the Indonesian historiography tradition. Various historical literature records that all major events in Indonesian history—as a nation—are masculine and strongly dominated by male narratives. There is no space for women to be present in the narratives of the past. As if the history of Indonesia is a history of men, whereas if critical research is done then women such as men have a past narrative that is also important. Women are present and give meaning to the development of the nation’s history. This matter is absent in Indonesian historiography. The strength of gender bias in the historiography of Indonesia can not be separated from the strong patriarchal culture in the life of society. Thus the gender bias ultimately forms a canon, so this is then reproduced from generation to generation. This article argues that critical research by revealing a new fact is a power to change gender bias in Indonesian historiography.

Keywords: gender bias, nationalism awareness, women’s history writing

Tulisan ini mendiskusikan tentang bias gender di dalam tradisi historiografi Indonesia. Berbagai kepastakaan sejarah mencatat bahwa semua peristiwa besar terkait dengan Indonesia sebagai sebuah bangsa, bersifat maskulin dan sangat didominasi oleh narasi laki-laki.

Tidak ada sedikit pun ruang bagi perempuan untuk hadir di dalamnya. Seakan-akan sejarah Indonesia adalah sejarahnya laki-laki, padahal jika penelitian kritis dilakukan maka perempuan seperti halnya laki-laki mempunyai narasi masa lalu yang tidak kalah penting. Perempuan hadir dan memberi arti bagi perkembangan sejarah bangsa. Hal inilah yang absen dalam historiografi Indonesia. Kuatnya bias gender di dalam historiografi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kuatnya budaya patriarki di dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian bias gender pada akhirnya membentuk sebuah kanon, dan kemudian direproduksi dari generasi ke generasi. Artikel ini berargumen penelitian kritis dengan mengungkapkan fakta baru merupakan kekuatan untuk mengubah bias gender di dalam historiografi Indonesia.

Kata kunci: bias gender, kesadaran kebangsaan, penulisan sejarah perempuan

Lelly Andriasanti (Qureta, Jakarta, Indonesia)

Ibuisme Islam Politik dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2017

Ibuisms of Political Islam in the Election of Jakarta Governor in 2017

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 3, Agustus 2018, hal. 161-171, 2 tabel, 1 gambar, 18 daftar pustaka

The chaotic political issues always accompany the nation of Indonesia until this day. One of them is reflected in political dimension which summarized on the intolerance narrative in the election of Jakarta governor in 2017. Nonetheless, gender and women dimensions seem to shrink from public attention. Within the framework of the state, the important role of women for national life is reduced in the ideology of ibuisms. This ideology actually finds a way in triggering activation of women when adapting to Political Islam. For that reason, research question of this paper is how the ibuisms of political Islam affect the perception and preferences of female voters in the election of Jakarta governor in 2017? In order to answer the question, this paper uses a qualitative methodology with a phenomenological approach. As the final result, this paper conclude that in the framework of ibuisms of political Islam, women played a role as agent which directing women voter perception. It is worked in taklim's mobilization network where women voter are asked vow to vote or do not vote particular candidate in Jakarta governor election in 2017.

Keywords: ibuisms of political Islam, Jakarta governor election, state ibuisms, politization of women's voice

Carut-marut persoalan politik selalu mengiringi perjalanan bangsa Indonesia hingga saat ini. Salah satunya tampak pada dimensi politik yang terangkum dalam narasi intoleransi di Pilgub Jakarta 2017. Walakin, dimensi gender dan perempuan seolah-olah menyusut dari perhatian publik. Dalam kerangka negara, peran penting perempuan dalam kehidupan kebangsaan direduksi dalam paham ibuisme. Ideologi ini justru menemukan jalan dalam memicu aktivasi perempuan ketika beradaptasi dengan Islam Politik. Atas dasar itulah, rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana ibuisme Islam politik memengaruhi persepsi dan preferensi pemilih perempuan dalam Pilgub Jakarta 2017? Dalam menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sebagai hasil akhir, tulisan ini menyimpulkan kerangka ideologi ibuisme Islam Politik telah mendorong perempuan untuk memainkan peran sebagai agen yang mengarahkan persepsi pemilih perempuan. Hal ini dilakukan dalam jejaring mobilisasi taklim atau pengajian di mana para pemilih perempuan dimintai sumpah untuk memilih atau tidak memilih pasangan tertentu dalam Pilgub Jakarta 2017.

Kata kunci: ibuisme Islam politik, Pilgub Jakarta, ibuisme negara, politisasi suara perempuan.

Fitria Sari (Program Studi Kajian Gender, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia)

Negosiasi dan Otonomi Istri Mantan Narapidana Terorisme

Negotiation and Autonomy of the Wives of Former Convicted Terrorists

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 3, Agustus 2018, hal. 173-182, 6 daftar pustaka

The discussion on terrorism is currently focused on issues concerning law enforcement efforts, cooperation between defense institutions, analysis of legal policies, and definitions of terrorism. Women (especially wives) are excluded from the process of dialogue and response to terrorism. This study emphasizes the experience and voice of the wives of former convicted terrorists. This article explores the process of upheaval and negotiation from the extremist narratives contained in the logic of thinking as a struggle in the context of self-acceptance and autonomy. This study uses a case study approach with a feminist perspective, and in-depth interviews as a method of data collection. The feminist view of Relational Autonomy and the Politics of Piety was chosen as a theoretical framework for analyzing findings. The results of the study indicate that there is an indoctrination from the husband about the teachings of extremism and that the wife experiences a struggle to internalize the teaching. On the other hand, there are also findings that show wives also negotiate with their husbands in carrying out the teachings of extremism. The conclusion of this study shows that the wife's figure experiences the process of constructivism and relational autonomy in the struggle process and its negotiations so far. In addition, the wife can also be seen as an agent to strengthen the spirit of nationalism through the values of tolerance.

Keywords: terrorism, extremism, wife of former convicted terrorist, husband and wife relations, relational autonomy

Diskursus terorisme saat ini masih berfokus pada isu tentang upaya penegakan hukum, kerjasama antar lembaga pertahanan, analisis kebijakan hukum, dan definisi tentang terorisme. Perempuan (khususnya istri) menjadi sosok yang teresklusi dalam proses dialog dan respons mengenai terorisme. Penelitian ini menekankan pada pengalaman dan suara dari para istri mantan narapidana terorisme. Artikel ini mengupas proses pergolakan dan negosiasi dari narasi ekstremis yang terdapat pada logika berpikir sebagai sebuah perjuangan dalam konteks penerimaan dan otonomi diri. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan perspektif feminis, dan wawancara mendalam sebagai metode pengumpulan data. Pandangan feminis tentang Otonomi Relasional dan Politik Kesalahan dipilih sebagai kerangka teori untuk menganalisis temuan. Hasil penelitian menunjukkan adanya indoktrinasi dari suami tentang ajaran ekstremisme dan istri mengalami pergulatan untuk menginternalisasi ajaran tersebut. Di sisi lain, ada pula temuan yang menunjukkan para istri juga melakukan negosiasi kepada suami dalam menjalankan ajaran ekstremisme. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sosok istri mengalami proses konstruktivisme dan otonomi relasional dalam proses pergulatan dan negosiasinya selama ini. Selain itu, istri juga dapat dilihat sebagai agen untuk memperkuat semangat kebangsaan melalui nilai-nilai toleransi.

Kata Kunci: terorisme, ekstremis, istri mantan narapidana terorisme, relasi suami istri, otonomi relasional

Ruth Indah Rahayu¹, Iqraa Runi Aprilia² (¹Institut Kajian Krisis dan Strategi Pembangunan Alternatif [Inkrispena], Jakarta, Indonesia; ²Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Rekonstruksi Pemahaman Kebangsaan: Percakapan Tentang Perempuan dan Kebangsaan

***Reconstructing the Notion of Nationalism: Conversations
About Women and Nationalism***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 3, Agustus 2018, hal. 183-192, 16 daftar
pustaka

Contemporary feminists in Indonesia do not yet have questions about nationalism, since the conversation about nationalism has been considered final at the beginning of Indonesian independence. In fact, in terms of contemporary analysis, women have problems with nationalism, when the definition of nationalism is dominated by the study of political science that is male-view biased. By tracing history to contemporary time, the relationship between women and nationalism is dominated by patriarchal interests for the mobilization of power, even if women have an independent political interest. That is why political interests of women are situated marginally in nationalism. But if we use the perspective of the social sciences, as feminist theories, then the notion of nationalism is broader than that of women and the state. We are still less productive in abstracting the relationship between women and citizens in nationalism, while it is a daily practice of women's struggles both personally and organically. Women have proven to be an active agency to become citizens beyond the mobilization of the state. This paper seeks to arouse feminist questions about nationalism, in order to reveal the role of women who are hidden in nationalism.

Keywords: feminist talks, feminist question, women, nationalism, citizenship, marginally situated

Feminis kontemporer di Indonesia belum mempunyai pertanyaan tentang kebangsaan, karena percakapan tentang kebangsaan telah dianggap final pada awal kemerdekaan Indonesia. Faktanya, ditinjau dari kondisi dan waktu kontemporer, perempuan mempunyai problem dengan kebangsaan, ketika definisi kebangsaan didominasi oleh studi ilmu politik yang bias *male-view*. Dengan merunut sejarah hingga waktu kontemporer, relasi antara perempuan dan kebangsaan didominasi oleh kepentingan patriarki untuk mobilisasi kekuasaan, sekalipun perempuan mempunyai kepentingan politik yang independen. Itu sebabnya kepentingan politik perempuan disituasikan marginal dalam kebangsaan. Akan tetapi jika kita menggunakan perspektif ilmu-ilmu sosial, sebagaimana teori-teori feminis, maka pengertian kebangsaan lebih luas dari sekadar relasi perempuan dan negara. Kita masih kurang produktif dalam mengabstraksikan relasi perempuan dan kewargaan di dalam kebangsaan, padahal itulah praktik sehari-hari yang diperjuangkan perempuan secara pribadi maupun terorganisasi. Perempuan telah terbukti menjadi agensi yang aktif untuk menjadi warga dan warga negara melampaui mobilisasi negara. Tulisan ini berusaha untuk membuat pertanyaan feminis tentang kebangsaan, agar dapat mengungkap peranan perempuan yang disituasikan tersembunyi dalam kebangsaan.

Kata kunci: percakapan feminis, pertanyaan feminis, perempuan, kebangsaan, kewargaan, disituasikan marginal

Kebangkitan Para “Ibu Bangsa” Sejak Masa Pergerakan Anti Kolonial Hingga Awal Kemerdekaan Indonesia

The Revival of the “Mothers of the Nation” from the Period of Anti Colonial Movement until the Independence of Indonesia

Siti Utami Dewi Ningrum

Program Studi S2 Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosiohumaniora Bulaksumur Yogyakarta 55281 Indonesia

utamydewi08@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 2 Juli 2018, direvisi 22 Juli 2018, diputuskan diterima 10 Agustus 2018

Abstract

“Mothers of the Nation” or *ibuism* is a term that is often considered negative in the study of women’s history. This is related to the nation’s political journey, during which the New Order regime took power, the terminology was used to control and dominate women in Indonesia. Further explored, in the 1920s, the spirit of nationalism are grew, including among the (*priayi*) noble women. They formed an association and held the Indonesian Women’s Congress I in 1928. According to Susan Blackburn, what women did at the time was their nationalistic form, becoming “Mothers of the Nation.” Using a historical approach, this paper seeks to retrace how early noble women came into existence and formulated their ideas of nationalism. The sources used are the result of literature studies, whether magazines, books, scientific papers, memoirs or biographies of women movement. This paper also use oral and photo sources to complete the experiences of women who involved in this topic.

Keywords: mothers of the nation, women’s history, nationalism, noble women

Abstrak

“Ibu Bangsa” atau *ibuisme* merupakan terminologi yang sering kali dianggap bermakna negatif dalam kajian tentang sejarah perempuan. Hal ini berkaitan dengan perjalanan politik bangsa, di mana saat rezim Orde Baru berkuasa, terminologi tersebut digunakan untuk mengontrol dan mendomestikasi perempuan di Indonesia. Jika ditelusuri lebih jauh, pada tahun 1920-an, semangat kebangsaan semakin membara, termasuk di kalangan perempuan priayi. Mereka membentuk perkumpulan hingga mengadakan Kongres Perempuan Indonesia I tahun 1928. Menurut Susan Blackburn, yang dilakukan oleh para perempuan saat itu adalah bentuk nasionalisme mereka, menjadi “Ibu Bangsa”. Menggunakan pendekatan sejarah, tulisan ini berusaha merunut kembali bagaimana perempuan priayi mula-mula hadir dan merumuskan idenya tentang semangat berkebangsaan. Sumber-sumber yang digunakan merupakan hasil dari studi pustaka, baik majalah, buku, karya ilmiah, memoar maupun biografi para perempuan pergerakan. Digunakan pula sumber lisan dan foto untuk dapat melengkapi pengalaman perempuan yang terlibat dalam tema tulisan ini.

Kata kunci: ibu bangsa, sejarah perempuan, nasionalisme, perempuan priayi

Pendahuluan

Abad ke-20 disebut oleh Henk Schulte Nordholt sebagai era modernitas, yakni muncul gagasan baru dan dianggap lebih maju dengan peran yang lebih jelas dan menggeser gagasan-gagasan lama (Nordholt 2002, h. 215). Priayi¹ merupakan golongan yang banyak mengambil kesempatan tersebut untuk dapat maju dan menentukan nasib yang lebih baik dalam masyarakat (Scherer 2012, hh. 13-19; Kartodirdjo, Sudewo & Hatmosuprobo 1987, h. 27). Kebangkitan gerakan perempuan Indonesia pada tahun 1920-an pun tidak bisa lepas dari adanya perubahan kehidupan sosial yang dialami oleh para perempuan priayi. Mereka, para “ibu

bangsa” merumuskan ide-ide baru tentang kemajuan perempuan dan nasionalisme.

Dalam hal ini, kebangkitan para “ibu bangsa” tentu bukan hal yang tiba-tiba, namun melalui proses negosiasi yang sangat panjang. Tulisan ini berusaha menampilkan bagaimana perempuan priayi mula-mula hadir dan merumuskan idenya tentang semangat berkebangsaan. Nyi Hajar Dewantara, Nyi Sri Mangunsarkoro dan Nyi Siti Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito dipilih sebagai representasi “ibu bangsa” dan menjadi subjek yang dibahas dalam tulisan ini. Mereka berasal dari kalangan priayi nasionalis dan terlibat dalam awal pergerakan perempuan Indonesia.

Terminologi “ibu bangsa” sendiri diambil dari pidato Nyi Sri Mangunsarkoro dalam Kongres Perempuan II di Jakarta tahun 1935 (Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa 1996, h. 133). Dalam kongres tersebut ia menyampaikan tentang pentingnya keterlibatan perempuan sebagai ibu, baik di dalam keluarga maupun masyarakat. Madelon Djajadiningrat-Nieuwenhuis menyebut peran ini dengan terminologi *ibuisme*, yaitu perempuan mampu berada pada ruang privat dan publik sekaligus. Mereka juga bahkan mampu membentuk jaringan ekonomi dan sosial yang berfungsi sebagai penopang kesuksesan keluarga, masyarakat dan negara (Djajadiningrat-Nieuwenhuis 1987, hh. 43-44).

Sebagai tulisan sejarah, fakta-fakta disusun dan dianalisis dengan perspektif gender sehingga menghasilkan tulisan yang mampu menarasikan pemikiran para “ibu bangsa” yang sesuai dengan jiwa zamannya. Pemikiran tersebut didapat dari dokumentasi yang telah dilakukan, baik sumber primer maupun sekunder. Sumber primer yang digunakan berupa artikel yang dimuat dalam majalah serta pidato yang pernah disampaikan oleh mereka. Buku, karya ilmiah, foto dan biografi kolektif menjadi sumber sekunder yang digunakan dalam tulisan ini. Selain itu digunakan pula arsip dan wawancara yang mendukung fakta-fakta yang ditemukan dari sumber primer.

Perempuan Priayi dalam Perubahan Kehidupan Masyarakat Jawa Abad ke-19 hingga abad ke-20

Dalam tulisannya yang berjudul “*Spirited Srikandhis and Sly Sumbadras: The Social, political and economic role of women at the Central Javanese courts in the 18th and early 19th Century*”, Peter Carey dan Vincent Houben menggambarkan sosok perempuan priayi dalam dua tokoh wayang, Srikandi dan Sumbadra. Srikandi ialah sosok perempuan maskulin yang memiliki keahlian memanah dan berperang. Saat terjadi perang Barathayudha antara Pandawa bersaudara dan Kurawa, Srikandi tampil dan mengalahkan Bima. Sumbadra digambarkan sebagai perempuan yang feminin. Ia memiliki peran yang sangat vital untuk melahirkan keturunan yang kuat (Carey & Houben 1987, hh. 13-15).

Sebagai Srikandi dan Sumbadra, perempuan priayi pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19 dianggap sebagai sosok yang kuat dan memiliki peran penting, baik dalam politik, ekonomi, spiritual dan sosial. Peran tersebut mengalami perubahan setelah perang Jawa (1825-1830). Pada akhir abad ke-19 melalui pemerintah kolonialnya, orang Eropa mulai menguasai Jawa.

Menurut Peter Carey dan Vincent Houben, sejak saat itu pembagian peran antara laki-laki dan perempuan mulai dilakukan. Laki-laki mengambil alih peran politik dan ekonomi, menjadi pemimpin dalam rumah tangga dan masyarakat. Mereka beranggapan bahwa kesatrialah yang bertanggung jawab atas hal-hal tersebut. Para perempuan sendiri diberi tugas sebagai ibu yang dapat menghasilkan keturunan dan melestarikan kebudayaan Jawa atau disebut dengan *priayisasi*.²

Pembagian peran tersebut diajarkan secara turun-temurun bahkan ditulis sebagai pedoman. Pakualam I memberikan *Serat Piwulang* kepada anak laki-lakinya, Arya Suryaningrat sebagai pedoman menjalani kehidupan pernikahan yang baik dan bahagia. Naskah tersebut ditulis pada 19 Sapar 1756 atau tahun 1828 Masehi. *Serat Piwulang* terdiri dari *Serat Piwulang Putra* diperuntukkan bagi laki-laki dan *Serat Piwulang Estri* diperuntukkan bagi perempuan. Serat tersebut dalam bentuk tembang macapat yang terdiri dari 28 pupuh. Masing-masing pupuh memiliki tembang dan tema cerita yang berbeda. Beberapa tema dalam *Serat Piwulang Estri* di antaranya ialah tentang perkawinan serta konstruksi tentang perempuan dan pria dalam keluarga pada abad ke-19 (Andrianie 2004, h. 213). Menurut Elsbeth Locher-Scholten, pembagian peran tersebut dipengaruhi oleh kehidupan orang Eropa abad ke-19 akibat industrialisasi, urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut kemudian dibawa oleh pemerintah Belanda ke wilayah jajahannya. Melalui interaksi rumah tangga orang Eropa dan priayi serta pendidikan gaya Barat pengaruh tersebut ditularkan (Locher-Scholten 2000, hh. 29-30).

Kesadaran akan kemajuan perempuan priayi pun semakin meluas pada abad ke-20, meskipun masih terbelenggu pada konstruksi peran gender mereka. Sebagian besar orang tua masih takut anak gadisnya bergaul di sekolah dengan teman lawan jenisnya. Selain itu mereka juga takut bahwa anak gadisnya akan sulit mendapatkan jodoh karena jumlah laki-laki yang berpendidikan saat itu masih sangat terbatas. Hal tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan kekecewaan dan perkawinan yang tidak bahagia. Selain itu para gadis berusia 10-12 tahun akan sulit untuk melanjutkan pendidikannya karena harus dipingit (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 1977, hh. 10-12).

R.A. Dewi Sartika, R.A. Lasminingrat, dan R.A. Kartini menjadi pionir dalam mengupayakan pendidikan

perempuan. Mereka menganggap bahwa ibulah yang menjamin kemajuan sebuah bangsa. Melalui pemikiran tersebut, mereka mendirikan sekolah-sekolah bagi para perempuan priayi lainnya agar kelak dapat menjadi istri dan ibu yang modern.³ Dalam hal ini, pendidikan yang diberikan untuk perempuan disesuaikan dengan kodrat mereka, sebagai ibu. Hal tersebut juga berlaku bagi kriteria karier yang ingin mereka geluti, yaitu sebagai seorang pendidik atau guru (Kartini 2014, hh. 533-534).

Dan siapa yang paling banyak berbuat untuk yang terakhir ini yang paling banyak membantu mempertinggi kadar budi manusia? Perempuan, ibu. Karena yang pertama-tama di pangkuan perempuanlah manusia menerima didikannya. Di sana anak mula-mula belajar merasa, berpikir, berbicara. Dan didikan yang pertama kali itu bukan tanpa arti bagi semua penghidupan. (Kartini 2014, h. 52)

Sekolah guru atau *Kweekschool* dan sekolah khusus gadis menjadi pilihan para orang tua untuk memberikan pendidikan bagi anak gadisnya. Mereka lebih merasa aman meskipun sekolah tersebut berada di luar kota karena anak-anak mereka akan tinggal di asrama, dididik untuk menjadi perempuan priayi modern oleh guru-guru Eropa dan pribumi.

Menurut Frances Gouda, dalam hal ini perempuan cenderung berfungsi sebagai penengah antara "inovasi dan tradisi". Mereka diberi akses untuk menikmati kehidupan yang modern namun pada batas-batas tradisi yang telah ditentukan (Gouda 2007, h. 172). Perempuan dipersiapkan untuk menjadi ibu yang modern, ibu yang dapat mendidik anak dan memajukan masyarakatnya. Mengenai perubahan kehidupan perempuan, Madelon melihat bahwa dalam perannya sebagai seorang ibu, perempuan priayi tidak serta-merta pasif. Mereka menjadikan konstruksi tersebut sebagai sumber kekuatan. Saat borjuis Eropa datang ke Hindia Belanda dan bergaul dengan para priayi maupun menyebarkan melalui saluran pendidikan, kehidupan priayi mengalami transformasi dari tradisional ke modern. Wanita priayi yang awalnya hanya melakukan peran priayisasi kemudian meluas kepada perannya dalam ibuisme.

Tamansiswa sebagai perguruan yang didirikan oleh kalangan priayi nasionalis pada tahun 1922 pun tidak lepas dari pola pendidikan yang berbasis gender. Perguruan Tamansiswa mendidik para siswanya untuk menjadi manusia merdeka dan sesuai dengan konstruksi kodrat serta budaya bangsanya. Perempuan diajarkan untuk dapat menjadi ibu yang modern dan laki-laki dididik untuk dapat menjadi bapak yang dapat

memimpin bangsanya menuju masa depan yang maju dan merdeka. Sebagai perguruan yang berpihak pada nasib pribumi, Perguruan Tamansiswa cepat mendapat perhatian para priayi nasionalis untuk menyekolahkan anaknya di sana. Banyak pula kaum pergerakan yang memilih untuk bergabung dalam Tamansiswa, baik sebagai siswa maupun *pamong* atau guru di sana, termasuk para perempuan priayi. Para "ibu bangsa" lahir dari rahim perguruan Tamansiswa.

Perguruan Tamansiswa: Mendidik Perempuan Priayi Modern

R.M. Suwardi dan R.A. Sutartinah kembali ke Jawa dari pengasingannya di Belanda pada 1919. Melalui berbagai diskusi dengan sebuah kelompok kebatinan priayi, Selasa Kliwonan, mereka kemudian mendirikan sebuah perguruan nasional Tamansiswa. Perguruan tersebut menggunakan landasan budaya, yang para siswanya akan dididik untuk memiliki jiwa yang merdeka (Madjelis Luhur Persatuan Tamansiswa 1961, h. 13). Tujuan tersebut dilatarbelakangi oleh keprihatinan mereka atas kondisi priayi yang dianggap semakin jauh dari budaya bangsa mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakanlah sistem asosiasi, memadukan antara budaya Barat dan Timur.

Zaman berikutnya adalah zaman kesadaran nasional. Di mana-mana di seluruh dunia adalah tugas dari pendidikan dan pengajaran, untuk mematangkan dan mempersiapkan anak-anak buat masyarakatnya sendiri. Sembojanja ialah "kembali kepada jang nasional". Ini bukan berarti bahwa pengetahuan dan metode barat lalu dilemparkan, jang memang tidak mungkin, tapi djiwanja harus berorientasi kepada milik sendiri. Itulah hendaknja jang mendjadi djaminan untuk perdamaian batin, djuga djaminan terhadap berantakannya kebudajaan dan kemasjarakatan, jang gejala-gejalanya pertama telah tampak. (Madjelis Luhur Persatuan Tamansiswa 1961, h. 47)

Hal-hal yang bersifat feodalisme, seperti penggunaan gelar kebangsawanan dihapuskan, digantikan dengan sebutan Ki dan Nyi. Gelar tersebut merujuk pada gelar kalangan terdidik dan berupaya memunculkan kesetaraan antar anggotanya. Tahun 1931 R.A. Sutartinah dan R.M. Suwardi mengganti nama mereka dengan Nyi dan Ki Hajar Dewantara.

Perguruan Tamansiswa mendapat dukungan dari para priayi nasionalis. Banyak dari mereka yang mendaftarkan diri menjadi *pamong* (guru) dan menyekolahkan anak-anaknya di sana. Beberapa di antara mereka juga menemukan jodoh yang memiliki kesamaan ideologi dan kemudian menikah, membentuk

keluarga nasionalis. Lambat laun perguruan Tamansiswa semakin berkembang dan menumbuhkan bibit-bibit nasionalisme yang semakin beragam, termasuk di kalangan para perempuannya.

Tamansiswa dan Ki Hajar Dewantara kemudian menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai salah satu pendiri perguruan tersebut, priayi keturunan keraton Pakualaman ini banyak mencurahkan pemikirannya dalam membentuk sistem dan peraturan di Tamansiswa, termasuk tentang perempuan. Dalam tulisannya di majalah *Wasita* bulan Desember 1928, ia meyakini akan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun yang disesuaikan dengan kodrat yang telah ditetapkan (Madjelis Luhur Persatuan Tamansiswa 1961, h. 247).

Kodrat-iradatnja manoesia, jang beroedjoed perempoean dan laki-laki, itoe seonggoehlah mengandoeng maksoed kekalnja toeroenan, dalam hal mana orang laki-laki mendjadi ladjer atau tiang toeroenan dan orang perempoean mendjadi pemangkoe toeroenan.[...] ("Peratoeran Besar Wanita Tamansiswa" 1939, h. 59)

Laki-laki dikonstruksikan sebagai *lajer keturunan* atau tiang keturunan. Dalam perannya tersebut, laki-laki dicitrakan sebagai sosok yang kuat dalam segala-galanya. Ia adalah penentu untuk memilih pasangan yang dapat menghasilkan keturunan yang baik sesuai dengan *bibit, bebet, bobot* (Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa 2013, h. 259). Pasangan dari *lajer keturunan* ini ialah pemangku keturunan, yaitu peran yang diberikan kepada perempuan sebagai tempat tumbuhnya manusia. Sebagai seorang pemangku keturunan, perempuan dicitrakan sebagai sosok yang lembut dan harus memiliki kesucian dalam dirinya (Ki Hadjar Dewantara 1935, h. 259). Dalam perannya tersebut, perempuan diharapkan mampu menghasilkan keturunan yang baik sehingga maju mundurnya sebuah peradaban bergantung pada perempuan.

Konstruksi tersebut terus direproduksi dalam ajaran-ajaran yang diberikan di Tamansiswa, baik di sekolah maupun asrama. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam Tamansiswa bahkan tidak bisa lepas dari konstruksi tersebut. Ki Hajar bahkan dengan aktif menulis dan menjawab pertanyaan di *Wasita* dan *Poesara* untuk menjelaskan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota perempuannya (Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa 2013, hh. 245-247)



Gambar 1. Ki dan Nyi Hajar Dewantara di antara pamong dan siswa Taman Siswa
Jl. Tanjung, Yogyakarta, 1925.

Sumber: Museum Dewantara Kirti Griya Taman Siswa, Koleksi 1-60

Dalam perguruannya, murid yang bersekolah di Tamansiswa dididik bersama dalam satu kelas. Meskipun begitu, Tamansiswa tetap membedakan kebijakan dan beberapa jenis pelajaran berdasarkan gender, terlebih saat murid mengalami masa pubertas. Perempuan dinilai sebagai makhluk yang pasif secara seksual, sedangkan laki-laki aktif secara seksual. Perbedaan tersebut membuat pengawasan yang dilakukan pun berbeda. Pengajaran kesopanan terhadap perempuan lebih ditekankan karena perempuan yang memiliki pengetahuan "pagar keselamatan" akan terhindar dari godaan laki-laki (Madjelis Luhur Persatuan Tamansiswa 1961, hh. 6-9).

Pada tahun 1924 Tamansiswa menyediakan tempat tinggal bagi siswanya yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Siswa perempuan tinggal di Wisma Rini sedangkan siswa laki-laki tinggal di Wisma Priya. Mereka diawasi oleh *pamong* atau pengurus asrama dengan peraturan yang telah ditentukan. Pendirian asrama tidak terlepas dari upaya Tamansiswa untuk mendidik tidak hanya dari segi intelektual, namun juga dari tingkah laku dan kesopanan ("Perajaan Windon Wisma-Rini Mataram" 1932, h. 60).

Ki Hajar mengatur cara berpakaian perempuan di Tamansiswa. Menurutnya, meskipun perempuan telah menikmati perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan Barat, mereka harus tetap mengenakan kain dan kebaya. Hal tersebut dianggap sebagai penghargaan atas budaya dan bentuk nasionalisme mereka.

Hingga sekarang mendjadi kebiasaan mereka naik sepeda itoe dengan berpakaian tjara Eropa; ini boleh sadja. Akan tetapi alangkah baiknja djika mereka soeka dan berani berpakaian tjara kebangsaan, karena ini memboektikan mereka itoe mempoenjai rasa besar hati atas kebangsaannja (*nationale trots, zelfbewustheid, superioriteitsgevoel*). (Ki Hadjar Dewantara 1935, hh. 12- 13)

Konstruksi perempuan sebagai *pemangku keturunan* pun berpengaruh pada karier mereka. Dalam artikel berjudul "Perempuan dalam Dunia Pendidikan" yang

diterbitkan oleh *Wasita* bulan Desember 1928, Ki Hajar menjelaskan bahwa menjadi tenaga pendidik merupakan karier yang paling tepat bagi para perempuan (Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa 2013, hh. 248-249). Ia beranggapan bahwa perempuan memiliki sifat sabar, teliti, pemeliharaan dan cinta kasih daripada laki-laki (Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa 1961). Sifat-sifat tersebut pulalah yang ia harapkan dapat digunakan oleh para perempuan untuk memengaruhi keadaan yang ada di sekelilingnya, baik dalam politik, organisasi, dan lainnya (Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa 2013, h. 248).

Sudah saya terangkan, bahwa untuk mengetahui perbuatan atau pekerjaan manakah boleh dilakukan oleh perempuan, haruslah kita senantiasa mengingat kodratnya perempuan. Berhubung dengan itu, maka mudahlah kita mengerti, bahwa dunia pendidikan ialah tempat kaum perempuan yang sangat laras dengan kodrat istri, lahir dan batin. (Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa 2013, h. 248)

Sebagai perguruan yang mengusung semangat nasionalisme, Tamansiswa kemudian didatangi oleh para generasi muda yang ingin memperjuangkannya, tidak terkecuali para perempuan priayi. Mereka berkumpul tidak hanya untuk mendapatkan pekerjaan, namun juga merumuskan perjuangan nasional bersama-sama. Hal-hal yang diajarkan oleh Tamansiswa tentang perbedaan gender kemudian dimanfaatkan oleh para perempuan priayi dalam memperjuangkan haknya dan berpartisipasi dalam dunia pergerakan.

Menjadi "Ibu Bangsa": Nasionalisme Para Perempuan Priayi Abad ke-20

Dalam bukunya yang berjudul *Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang*, Susan Blackburn menganalisis peserta Kongres Perempuan Indonesia I, 1928. Menurutnya, dari 22 peserta yang menonjol, 8 orang berasal dari kalangan priayi, sedangkan lainnya berasal dari kalangan Islam dan keluarga biasa. Mereka adalah perempuan-perempuan muda menengah ke atas yang mengenyam pendidikan modern.

Nyi Hajar Dewantara adalah salah satu dari mereka. Sebagai seorang perempuan yang cukup aktif dalam dunia pendidikan dan sekaligus istri dari tokoh Jawa nasionalis, Ki Hajar Dewantara, ia menjadi salah satu pemrakarsa kongres. Sebagai seorang pendiri perguruan Tamansiswa, ia membawa serta muridnya, Siti Sukaptinah untuk berpartisipasi dalam kongres. Selain itu, ada pula *памong* (guru) Tamansiswa yang kemudian aktif dalam perjuangan Wanita Tamansiswa dan pergerakan perempuan. Ia adalah

Sri Sulandari⁴. Tiga perempuan tersebut merupakan representasi dari perempuan priayi nasionalis. Mereka berasal dari berbagai latar belakang keluarga priayi Jawa dengan ideologi yang beragam. Hal yang sama dari tiga perempuan priayi tersebut ialah semangatnya dalam memajukan nasib perempuan dan bangsanya.

• Menjadi Sumbadra: Bentuk Nasionalisme Nyi Hajar Dewantara



Gambar 2. Foto Keluarga. Ki Hajar, Nyi Hajar dan putrinya, Ni Asti, berfoto di Belanda, 1919

Sumber: Museum Dewantara Kirti Griya Taman Siswa, Koleksi 2-62

Nyi Hajar Dewantara memiliki nama asli R.A. Sutartinah. Ia lahir pada 14 September 1890 dari pasangan Kanjeng Pangeran Haryo Sasraningrat, putra Pakubuwono III dan R.A. Mudmainah (Bandara R. Ayu Sasraningrat atau Dyah Ayu Sasraningrat), cicit pangeran Diponegoro. Ia menikah dengan sepupunya sendiri, R.M. Suwardi Suryaningrat pada Agustus 1913. Sebelum menikah, mereka melalui proses perjodohan yang dilakukan oleh kedua orang tua mereka pada 4 November 1907, sebelum R.M. Suwardi bersekolah ke sekolah kedokteran STOVIA di Batavia.

Sebagai keturunan priayi Pakualaman, R.A. Sutartinah dapat mengenyam pendidikan Barat dengan bersekolah di ELS. Ia juga sempat menuntut ilmu di Sekolah Kursus Guru di Sekolah Raden Mas Rio Ganda Atmaja tahun 1904. Di sana, ia juga mengajar. Pengalaman mengajarnya terus ia tekuni saat menemani suaminya menjalani hukuman pengasingan di Belanda. Ia menjadi guru Frobel di Weimaar pada 1914.

Setelah selesai menjalani masa pengasingan bersama suaminya, Nyi Hajar Dewantara pulang ke Jawa. Ia turut serta mendirikan perguruan Tamansiswa pada 1922 dan aktif terlibat di dalamnya. Di perguruan tersebut ia banyak melakukan terobosan untuk mengembangkan sayap nasionalisme Jawanya, terutama dalam kemajuan perempuan.

Bersama para guru perempuan di Yogyakarta, Nyi Hajar Dewantara mengadakan Kongres Perempuan Indonesia I. Dalam kongres, ia turut mengajak murid-muridnya di Tamansiswa untuk berpartisipasi. Dalam pidatonya yang berjudul "Adab Perempuan", Nyi Hajar membicarakan hal yang tidak jauh berbeda dengan semangat Tamansiswa yang diambil dari ajaran budaya Jawa. Perempuan ditempatkan sebagai *pemangku keturunan* dengan segala hak dan kewajibannya, menjadi seorang ibu bagi keluarga dan bangsanya. "Kita kaum perempuan wajiblah menghargai diri dan menghargai kewajiban manusia melanjutkan keturunan, wajiblah bersatu untuk mengekalkan tingkah laku beradab untuk kaum perempuan, demi keselamatan manusia dan dunia jua akhirnya," (Blackburn 2007, h. 245).

Sebagai seorang perempuan priayi sekaligus ibu dalam perguruan Tamansiswa, Nyi Hajar Dewantara mencontohkan dirinya seorang Dewi Sumbadra. Hal tersebut mencerminkan ideologinya sekaligus menjadi *role model* bagi para *pamong* dan murid-murid Tamansiswa. Ia mengajarkan berbagai hal, mulai dari tingkah laku, tata cara berpakaian, menjadi seorang istri, dan lainnya.

Nyi Hadjar Dewantara adalah seorang Dewi Sembodro yang halus budi pekertinya, tutur katanya dan segalanya. Tidak pernah aku mendengar suara keras walau setengah detikpun, beliau selalu dengan halus menyapa dan berkata dengan lembutnya. (Wanita Tamansiswa 1990, h. 59)

Menurut Christina S. Handayani dan Ardhian Novianto, sikap halus dari sifat feminin seorang perempuan priayilah yang membuat mereka memiliki kuasa (Handayani & Novianto 2011, h. 47). Hal tersebut diungkapkan pula oleh salah satu *pamong* Tamansiswa yang merasakan didikan Nyi Hajar Dewantara. Menurutnya, meskipun Nyi Hajar memiliki sikap yang halus, ia tetap menunjukkan ketegasannya dan disegani oleh lawan bicaranya (Nyi AS Gunawan dikutip dalam Wanita Tamansiswa 1990, h. 59).

Dengan petuah-petuah yang diberikan kepada kami secara halus dan *lumintu*, tidak pernah ada suara sumbang di antara kami, para penghuni "Wisma Rini", yang kurang lebih 30 orang berasal dari Jawa dan Sumatera. Secara keibuan beliau memberikan petunjuk-petunjuk kepada kami, antara lain bagaimana mengenakan kain (jarit). Petunjuk itu diberikan lebih-lebih kepada saya dan anak-anak dari Sumatera.

Karena baru di Tamansiswa-lah saya mengenakan pakaian Nasional. Sebelumnya kami selalu memakai pakaian secara barat. ... Memang suasana berwibawa yang ada pada Ki dan Nyi Hadjar sangat terasa dan tak pernah ada yang mempunyai keinginan menggangukannya. Peraturan-peraturan "Wisma Rini" dan "Wisma Pria" selalu kami taati. (Nyi Sudiro dikutip dalam Wanita Tamansiswa 1990, h. 1, hh. 3-4)

Dalam asrama Wisma Rini, asrama khusus perempuan di Tamansiswa, Nyi Hajar menganjurkan para *pamong* dan murid perempuan untuk memakai pakaian nasional, yaitu kebaya. Hal itu dilakukan sebagai salah satu bentuk perlawanan terhadap pengaruh budaya asing (Issom 2000, h. 40).

Nyi Hajar Dewantara juga banyak turut serta dalam sepak terjang Tamansiswa. Ia ikut serta dalam setiap kunjungan Ki Hajar ke cabang-cabang yang tersebar di Jawa dan luar Jawa. Bersamaan dengan itu, ia membentuk jaringan perempuan dan membangun strategi untuk memajukan kondisi perempuan, sesuai dengan semangat Kongres Perempuan Indonesia. Hal tersebut semakin menguat saat organisasi Wanita Tamansiswa dibentuk pada 1932 atas usulan salah seorang *pamong*, Nyi Sri Mangunsarkoro. Melalui Wanita Tamansiswa, sepak terjang Nyi Hajar dan para perempuan Tamansiswa lainnya semakin meluas, baik di dalam maupun di luar Tamansiswa.

Di Tamansiswa sendiri, Nyi Hajar banyak menyumbangkan ide dan tenaganya, terutama saat Ki Hajar Dewantara bergabung dalam PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat) tahun 1943 dan banyak berkegiatan di Jakarta. Nyi Hajar Dewantaralah yang kemudian menggantikan posisinya di Tamansiswa (Suratmin & Sutjiatiningih 1991, hh. 77-78). Ia duduk dalam Majelis Luhur, memimpin Tamansiswa untuk bertahan dari tekanan Jepang. Ia berusaha keras menghindarkan Tamansiswa dari propaganda Jepang dalam sekolah-sekolah (Dewantara 1979, h. 118).



Gambar 3. Ki dan Nyi Hajar Dewantara. Dengan kegembiraan serta kelegaan dari siswa-siswa Taman Siswa Pematang Siantar menyambut kehadiran Ki dan Nyi Hajar. Suasana gempar dan gembira para siswa menyambut kedatangan beliau. Sumber: Museum Dewantara Kirti Griya Taman Siswa, Koleksi 1-70

Nyi Hajar kembali memimpin Tamansiswa setelah Ki Hajar Dewantara wafat pada 26 April 1959. Ia ditunjuk sebagai Pemimpin Umum hingga akhir hidupnya. Melalui Rapat Majelis Luhur Paripurna Persatuan Tamansiswa tanggal 3-5 November 1965 di Yogyakarta, ia memutuskan beberapa hal untuk membersihkan orang-

orang Tamansiswa/PKI yang dianggap sebagai oknum-oknum kontra revolusioner. Cabang Tamansiswa yang anggotanya banyak terlibat dalam PKI dinonaktifkan sementara. Mereka yang diketahui terlibat dalam PKI diberi sanksi ("Daftar Anggota Perguruan Taman Siswa Di Madjelis Luhur dan Tjabang2/Persiapan/Tjabang/Kandidat Persiapan Tjabang Taman Siswa Di Daerah Djawa Tengah Jang Dikenakan Penindakan" 1965, h. 18).

Kondisi kesehatan Nyi Hajar pun semakin memburuk. Ia kemudian wafat pada 16 April 1971. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Wijayabrata, Yogyakarta (Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa 1996, h. 55, h. 65). Hal yang dilakukan oleh Nyi Hajar Dewantara dalam dunia pergerakan tidak bisa lepas dari latar belakangnya sebagai keturunan priayi Pakualaman. Berpegang pada ajaran leluhurnya, ia mampu menjalankan perannya sebagai *pemangku keturunan*. Dari rahim pendidikannya, ia mampu menjadi ibu, seorang Sumbadra yang berhasil merumuskan pemikirannya dan melahirkan para "ibu bangsa".



Gambar 4. Penghormatan/penaburan bunga pada makam Ny Hajar Dewantara oleh para pelayat/keluarga. Nyi Hajar Dewantara wafat 16 April 1971.

Sumber: Museum Dewantara Kirti Griya Taman Siswa, Koleksi 1-100

• **Nyi Sri Sulandari Mangunsarkoro: Srikandi Pejuang Keadilan Perempuan dan Kemerdekaan Bangsa**



Gambar 5. Nyi Sri Sulandari Mangunsarkoro (Tokoh Pergerakan Wanita)

Sumber: Museum Dewantara Kirti Griya Taman Siswa, Koleksi 1-64

Sri Sulandari lahir di Madiun pada 16 Mei 1905 dari seorang ayah yang bernama Wirjodidjoyo, seorang Menteri Kredit Bank Pemerintah Hindia Belanda di Walikikum dan Ngawi. Ia masih keturunan Mangkunegaran dan Adipati Ponorogo. Nama Mangunsarkoro sendiri ia dapatkan dari nama belakang suaminya, Sarmidi Mangunsarkoro. Lahir dari kalangan priayi membuat Sri Sulandari dapat bersekolah di *Gouvernements Meisjesweek's school* pada tahun 1924, di Salatiga. Saat bersekolah, ia aktif dalam Club Pekerjaan Tangan Keputrian Jong Java Salatiga dan menjadi ketua organisasi tersebut (Astuti 2003, hh. 55-57). Di situlah ia mulai menggeluti dunia pergerakan. Rasa nasionalismenya membawa ia mengabdikan diri di Tamansiswa Tegal, menjadi seorang *pamong*. Sikap anti kolonial dan cita-citanya memajukan nasib perempuan semakin ia geluti saat itu. Ia aktif dalam berbagai kegiatan, baik di dalam maupun di luar Tamansiswa.

Di Tamansiswa, Nyi Sri Mangunsarkoro merupakan *pamong* yang sangat aktif. Setelah menjadi *pamong* di Tamansiswa Tegal dari 1924-1925, ia pindah ke Yogyakarta dan menjadi *pamong* Taman Indriya Tamansiswa Yogyakarta 1925-1929. Setelah menikah dengan sesama *pamong* Tamansiswa cum kaum pergerakan, Sarmidi Mangunsarkoro, mereka menetap di Jakarta pada 1929. Di sana karier Nyi Sri Mangunsarkoro meningkat. Ia menjadi kepala sekolah Taman Indriya Tamansiswa Jakarta selama 1929-1934. Ia juga dipercaya menjadi ibu asrama di sana.

Sejak saat itu, pengabdianya kepada Tamansiswa semakin menguat. Pengalamannya sebagai ibu asrama menumbuhkan ide untuk membuat perkumpulan wanita Tamansiswa yang memiliki landasan. Usulan tersebut disampaikan pada 31 Maret 1931 dalam Konferensi Tamansiswa Jawa Tengah di Gedung Wisma Rini Mataram.

Maka djika Wanita Tamansiswa betoel-betoel akan memenoehi kewajibannja dalam doenia Taman Siswa, jang pertama kali kita haroes berani menjerahkan badan kita dan memboeang segala keinginan-keinginan oentoek keboetoehan diri kita sendiri dan selaloe pada malam dan siang, kita haroes mengingat kepada idam-idaman kita jang termoelia, idaman Indonesia Baroe. (Mangunsarkoro 1932, h. 88)

Keinginannya tersebut juga tidak terlepas dari pengamatannya tentang keadaan perempuan pada saat itu yang masih bergantung pada laki-laki. Untuk dapat terbebas dari keterbelakangan tersebut, maka Nyi Sri Mangunsarkoro merumuskan dua kewajiban yang harus dilakukan oleh wanita Tamansiswa, yaitu memperbaiki nasib perempuan dan mendidik anak. Dalam rapat

tersebut, ia juga merumuskan rancangan panduan bagi Wanita Tamansiswa yang kemudian disebut dengan "Peraturan Besar Wanita Tamansiswa".



Gambar 6. Pengurus Wanita Taman Siswa Yang Pertama. Belakang (searah jarum jam):

1. S. Sukaptinah Sunaryo, 2. -, 3. Nyi Sri Mangunsarkoro, 4. Nyi Surip, 5.— Depan: 1. Nyi Sugining Suparta, 2. Nyi Achadiyah Suwandi, 3. Nyi Sunryadi, 4. Sukemi.

Sumber: Museum Dewantara Kirti Griya Taman Siswa, Koleksi 1-71

Usulan dari Nyi Sri Mangunsarkoro tersebut kemudian disetujui oleh Ki Hajar Dewantara dengan mendirikan *Vrouwenraad* atau Majelis Wanita.

Lantaran pertimbangan-pertimbangan yang tersebut di atas itoe, maka atas oesaha Nji Mangoensarkoro dengan anggota-anggota kita pergoeroean di Mataram berdirilah di medan Konperensi Djawa Tengah pada h.b. 31-1-3 di gedoeng Wismo-Rini di Mataram. Dengan sabda para dahjang soentrang dan mentrik Tamansiswa lahirlah dengan selamat djabang baji yang pada konperensi besar kta ini akan dapat dimasoeakkan dalam "Burgelijke Stand" kita sebagai badan absah dalam Tamansiswa. Pada sekalian yang soedah beroebah dalam Rapat Wanita hari malam 31 Mart 1931 tadi, jaitoe Nji Mangoensarkoro, Ni Soerip, Ni Soekaimi, Ni Soedjarwo soedah sepantasnjalah kita memberi terimakasih atas perdja-poedjinja. (Ki Hadjar Dewantara 1931, h. 21-22)

Nyi Sri Mangunsarkoro juga sangat aktif menuliskan pemikirannya tentang pendidikan perempuan. Kepanduan adalah salah satu cara untuk mendidik para gadis menjadi istri dan ibu yang baik yang dapat memenuhi kewajibannya (W.T.S. Djakarta 1934, hh. 82-91). Hal ini karena dalam kepanduan para anggotanya diajarkan untuk hidup disiplin dan berguna bagi masyarakat yang dianggap sesuai dengan kodratnya.

Dalam artikelnya di *Poesara* pada tahun 1931, Nyi Sri Mangunsarkoro menjelaskan bahwa para perempuan

perlu dididik sifat dan sikap yang diajarkan kepada laki-laki. Mereka juga harus mengikuti perkembangan zaman. Menurutnya hal tersebut merupakan salah satu solusi bagi para perempuan agar mereka terbebas dari ketergantungannya terhadap kekuatan laki-laki.

Ta' tjoekoepkah, djika hanja anak² kita lelaki sadja yang haroes kita koeatkan kehideoepannya. Begitoe poen pada anak-anak kita perempoean haroes kita beri sendjata yang tadjam djoega. Sendjata ini boeat sebagian telah diberikan kepada anak-anak perempoean, akan tetapi beloem lengkap adanja.

Anak perempoean kita haroes bisa: a. Mempeladjadi beberapa ilmoe-ilmoe; b. Mempeladjadi pergerakan badan boeat pembelaan diri, seperti pentjak; c. Mempeladjadi kepradjoeritan; d. Mempeladjadi politik, ekonomi, dan sebagainya; e. Mempoenjai pengetahuan tentang djiwa (*psychologie*) lelaki.

Saudara-saudara, boekan itekah yang akan mendorong anak-anak perempoean kita kepada kemerdekaan? Mereka laloe tahoe dan merasai dengan jelas bahwa mereka ta' perloe lagi ditolong sadja oleh sandarannya lelaki. (Mangoensarkoro 1931, hh. 6-9)

Nyi Sri Mangunsarkoro kembali mempertegas wacananya tersebut saat memberi pidato dalam Rapat Ibu di Jakarta pada tahun 1933. Menurutnya, kehalusan memang perlu dimiliki oleh seorang perempuan, namun harus tetap mengandung kekuatan dan keberanian dalam menjalani kehidupan. Selain itu, kekuatan dan pengaruh perempuan yang sesungguhnya yang diperlukan dalam mencapai kesempurnaan (Mangoensarkoro 1933, h. 133). Hal itu pula yang dibutuhkan dalam dunia pergerakan perempuani Indonesia untuk mencapai kemerdekaan diri dan bangsanya.

Hanja dengan berdjalan yang berdasar atas kenjataan pergerakan kaoem iboe di Indonesia akan dapat mentjapai kemerdekaan yang semetinja. Kami tidak akan mengakoei kemerdekaan perempoean, yang memboeang keperempoeannya.

Sebab hanjalah orang yang berdiri atas dasarnya sendiri bisa hidoep koeat dan merdeka dalam segala-galanja. (Mangoensarkoro 1933, h. 133)

Melalui tulisan dan pidato-pidatonya, dapat disimpulkan bahwa Nyi Sri Mangunsarkoro memiliki hal yang melampaui zamannya. Ia dengan cerdas menggunakan ilmu yang ia dapatkan, baik dari sekolahnya dulu, hingga saat ia mengajar di Tamansiswa. Konsep *pemangku keturunan* tidak ia telan mentah-mentah. Ia justru menggunakannya sebagai strategi untuk dapat menembus sekat-sekat antara ruang domestik dan publik. Konstruksi peran ibu yang dilekatkan pada perempuan untuk melahirkan dan mendidik anak menjadi lebih luas dengan semangat nasionalisme yang ia miliki. Ia mulai mendobrak, agar

perempuan ikut hadir dalam menciptakan generasi baru yang dapat merdeka secara pikiran dan tindakan. Ia juga mendorong keterlibatan perempuan secara aktif dalam kegiatan sosial dan politik saat itu serta menciptakan masyarakat yang sadar akan kesetaraan. "Boeat kami, roemah tangga dan masjarakat tidak dapat dipisahkan. Tempat roemah tangga adalah didalam lingkoengan masjarakat," (Mangoensarkoro 1934a, h. 71).

Kutipan tulisannya tersebut menunjukkan bahwa ia ingin membawa isu domestik menjadi hal yang penting dan menjadi bagian dari masyarakat. Dalam hal itu pula kondisi dan kemajuan rumah tangga tidak bisa dilupakan jika ingin membangun masyarakat. Perempuan sebagai bagian penting dalam rumah tangga pun perlu untuk ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat memainkan peran sebagai ibu, baik di rumah maupun di dalam masyarakat (Djajadiningrat-Nieuwenhuis 1987, h. 45).

Ide awal tersebut kemudian ia formulasikan kembali dan disampaikan dalam Kongres Perempuan II di Jakarta tahun 1935 dengan konsep "Ibu Bangsa" (Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa 1996, h. 133). Menurutnya, yang dilakukan oleh perempuan di ranah domestik merupakan hal yang penting dan berpengaruh bagi kemajuan bangsa. Selain itu, turut aktifnya para perempuan dalam masyarakat menurutnya akan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap peran ibu.

Karena "keinsjafan ibu bangsa" itoelah pekerdjaan kita dalam roemah tangga akan mendjadi pekerdjaan jang berderajat tinggi, anak-anak kita jang kemoedian akan meroepakan bangsa Indonesia jang baroe, jang lebih koeat dan moelia daripada bangsa kita jang sekarang ini; pergaoelan kita sekaem akan mendjadi soember kemadjoean kita kaoem perempoean Indonesia; pengalaman kita atas keadaan bangsa akan mendjadi pendorong soepaja toeroet mentjepatkan kemajuan dan memperbaiki penghidoean bangsa.

Karena keinsjafan ibu bangsa itulah nasib kita, perempoean Indonesia, akan bertambah artinja, bertambah pentingnja, baik dalam roemah tangga maepoen dalam masjarakat. Kesempatan jang sebaik-baiknja membangoenkan keinsjafan iboe bangsa itu adalah soeatoe Kongres Perempoean Indonesia. (Mangoensarkoro 1935, hh. 129-130)

Selain pendidikan perempuan dan kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat, isu poligami juga menjadi perhatian, Nyi Sri Mangunsarkoro. Ia menjadi orang yang maju di garda paling depan untuk menentangnya. Hal tersebut terlihat saat diadakan peninjauan kembali UU Perkawinan dan poligami antara pemerintah Hindia Belanda bersama organisasi perempuan tahun 1931 (Astuti 2003, h. 93). Ketidaksetujuannya diungkapkan pula dalam *Poesara*

Agustus 1934. Ia menjelaskan bahwa praktik poligami tidak lagi sesuai dengan konteks zaman. Menurutnya, meskipun Islam mengizinkan poligami dengan keadilan, namun hal tersebut mustahil tercapai. Poligami terjadi akibat ketidakmampuan laki-laki dalam mengatur nafsunya. Untuk itu, ia menyarankan agar para laki-laki melakukan hal yang lebih bermanfaat, baik untuk keluarganya maupun bangsa. Ia juga menghimbau agar orang islam seharusnya mendukung pemberantasan poligami yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, yaitu kemanusiaan. Selain itu, poligami sangat merendahkan derajat wanita serta membuat mereka saling membenci satu sama lain (Mangoensarkoro 1934b, hh. 152-154).

Isu poligami sendiri sempat menjadi perdebatan yang cukup serius di kalangan perempuan pergerakan, terutama saat Kongres Perempuan Indonesia I, 1928 (Blackburn 2007, h.xxxvi-xxxvii). Pemerintah sendiri sempat mengadakan sensus untuk mengetahui angka poligami di Jawa pada tahun 1920-1930. Saat itu mereka melihat bahwa poligami merupakan sebuah bentuk pemborosan (Locher-Scholten 2000, h. 37). Hasil survei menunjukkan poligami paling tinggi dilakukan di Pekalongan. Dari total 537.583 perkawinan, sebanyak 501.730 melakukan perkawinan monogami dan 35.853 melakukan poligami dengan wanita dari dua hingga lebih dari empat orang ("Poligamie bij de inheemsche bevolking" 1930, h. 201).

Selain dalam isu sosial, Nyi Sri Mangunsarkoro pun aktif menyuarakan pendapatnya tentang isu-isu politik yang berkembang. Tahun 1941, pemerintah mengundang Nyi Sri Mangunsarkoro dan Nyi Siti Sukaptinah menjadi perwakilan perempuan pribumi untuk menyampaikan usulannya dalam kemajuan Hindia Belanda. Sebagai seorang nasionalis sejati, Nyi Sri Mangunsarkoro dengan tegas meminta kemerdekaan Indonesia.

Komisi Visman itu diketuai oleh tuan Visman. Dia memanggil tokoh wanita, yang dipanggil Nyi Sri Mangunsarkoro dan Nyi Sunaryo Mangunpuspito. Visman tanya, kalian ingin pemerintahan yang bagaimana di Indonesia ini? Nyi Sunaryo Mangunpuspito ingin Indonesia berparlemen, sedangkan Nyi Sri Mangunsarkoro ingin Indonesia merdeka. Padahal kata merdeka sangat tabu, bisa ditangkap sewaktu-waktu pada saat itu, tetapi Nyi Sri Mangunsarkoro berani banget. (Nyi Suratmi Iman Sudiyat 2014, wawancara 29 Desember)

Pada masa kemerdekaan, Nyi Sri Mangunsarkoro tetap aktif berpolitik. Sebagai ketua Perwari, ia membawa gerakan perempuan turut aktif dalam pusaran politik yang terjadi saat itu. Bergabung bersama Persatuan Perjuangan⁵, Perwari memperjuangkan kemerdekaan

Indonesia 100%. Tindakan tersebut membuat Perwari pecah. Untuk menyelesaikan perpecahan diadakanlah Kongres Perwari di Yogyakarta pada 15-17 Mei 1946. Kongres tersebut memutuskan agar Perwari memisahkan diri dari Persatuan Perjuangan dan gerakan politik. Nyi Sri Mangunsarkoro tidak menyetujui keputusan tersebut dan tidak mengetahui apa yang menyebabkan tindakannya disalahkan. Jabatan ketua Perwari pun diambil alih oleh Nj. Soekardjo Wirjopranoto dan pusat pimpinan dipindah ke Malang (Kementerian Penerangan Republik Indonesia 1950, h. 195).

Nyi Sri Mangunsarkoro tetap berpegang teguh pada tekad politiknya. Bersama Nyi Hadiprabowo ia membentuk Partai Wanita Rakyat di pendopo Tamansiswa, Yogyakarta pada 6 September 1946. Para anggota dan pengurus Partai Wanita Rakyat sebagian besar berasal dari Tamansiswa. Nyi Hajar Dewantara berperan sebagai penasihat, Nyi Sri Mangunsarkoro sebagai ketua, Nyi Hadiprabowo sebagai wakil, dan Ni Surip sebagai salah satu pembantunya. Oleh karena domisili para pengurus dan anggotanya berada di Yogyakarta, maka Pengurus Pusat pun bertempat di sana (Astuti 2003, hh. 121-125).

Sesudah Republik Indonesia kembali, sebagai akibat dari penandatanganan Statement Roem-Royen, pergerakan wanita Indonesia umum yang habis Kongres Perwari pada 17 Mei 1946 perjalanannya tidak berketentuan sehingga lama kelamaan menjadi impotent, karena tidak tahan menghadapi pengaruh perjuangan politik yang sangat tajam berhadapan satu sama lain itu bangun kembali. (Kementerian Penerangan Republik Indonesia 1950, h. 196)

Sikap apolitik organisasi perempuan pun sempat dikritik oleh Partai Wanita Rakyat. Menurut mereka perempuan harus terlibat dalam perjuangan politik untuk dapat mencapai masyarakat yang merdeka dan adil. Dalam Anggaran Dasarnya, partai ini menjelaskan bahwa tujuan dari Partai Wanita Rakyat ialah mencapai masyarakat sosialis dengan dasar kemanusiaan, kebudayaan, ketuhanan. Kemerdekaan Indonesia 100% dan kemajuan perempuan menjadi fokus utama partai saat itu (Kementerian Penerangan Republik Indonesia 1950, h. 196). Hal inilah yang kemudian mendorong para perempuan priayi nasionalis ini gigih berjuang dalam dunia politik.

Aksi pertama Partai Wanita Rakyat bersama Persatuan Perjuangan ialah terus melakukan oposisi terhadap Kabinet Syahrir, terutama saat Perjanjian Linggarjati ditandatangani. Dalam perkembangannya, Partai Wanita Rakyat kemudian bergabung bersama KOWANI. Mereka sempat mengadakan peringatan seperempat abad

pergerakan perempuan yang kepanitiaannya dibentuk pada tahun 1953. Panitia tersebut menghasilkan Yayasan Hari Ibu dan pembangunan monumen peringatan (Nyi Suratmi Iman Sudiyat 2014, wawancara 29 Desember).



Gambar 7. Pengurus Partai Wanita Rakyat cabang Yogyakarta 1954

Sumber: Foto koleksi Nyi Suratmi Iman Sudiyat

Setelah seluruh persiapan dilakukan, monumen pun diresmikan oleh Ibu Sukonto pada 22 Desember 1953 dan diberi nama "Gedung Persatuan Wanita". Ibu Sukonto ialah salah satu tokoh perempuan penggagas dan ketua Kongres Perempuan I. Ia adalah anggota dari Wanita Oetomo, sebuah organisasi perempuan nonpolitis di Yogyakarta (Suratmin & Sutjiatiningsih 1991, h. 8). Pembangunan monumen bertujuan untuk memberikan tempat bagi pendidikan perempuan, baik formal maupun informal (Nyi Suratmi Iman Sudiyat 2014, wawancara 29 Desember; de Stuers 2008, hh. 190-191).

Tahun 1951 Partai Wanita Rakyat sempat mengikuti Pemilihan Umum di Yogyakarta untuk memilih anggota DPRD. Sayangnya, Pemilu tersebut tidak berhasil memberi kesempatan kepada partai tersebut untuk menempatkan wakilnya dalam kursi pemerintahan. Kendatipun telah kalah dalam Pemilu DPRD Yogyakarta, Partai Wanita Rakyat tetap bertahan. Pada tahun 1953, Partai Wanita Rakyat memiliki 8 cabang, yaitu di Yogyakarta, Surakarta, Jakarta, Belitung, Bangka, Medan kabupaten dan kotapraja, dan Makassar. Partai Wanita Rakyat menjadi partai perempuan satu-satunya dan memiliki 3.050 anggota perempuan. Partai tersebut juga memiliki departemen-departemen khusus, yaitu departemen sosial, departemen pendidikan dan kebudayaan, departemen politik dan ekonomi, departemen penerangan serta departemen umum.

Di bawah kepemimpinan Nyi Sri Mangunsarkoro, Partai Wanita Rakyat kembali menguji nasibnya dalam

Pemilu 1955, namun tidak juga membawa hasil (de Stuers 2008, h. 191). Oleh karena tidak adanya kaderisasi yang kuat, Partai Wanita Rakyat pun menghilang setelah ditinggal oleh ketuanya. Nyi Sri Mangunsarkoro meninggal dalam kecelakaan tahun 1959 di Jakarta dan dimakamkan di Taman Wijayabrata (Nyi Sueratmi Iman Sudiyat 2014, wawancara 29 Desember; de Stuers 2008, h. 288). Sebagai seorang "ibu bangsa" Nyi Sri Mangunsarkoro memiliki semangat nasionalisme yang begitu kuat. Ia tidak hanya aktif dalam dunia pergerakan perempuan dan mengupayakan kemajuan perempuan dalam pendidikan dan keluarga, namun juga terlibat secara langsung dalam dunia politik yang masih sangat maskulin. Menggambarkan sosok Srikandi, Nyi Sri Mangunsarkoro mampu "bertempur" bersama para laki-laki untuk kemerdekaan bangsa.

• **Nyi Siti Sukaptinah: Menyuarakan Aspirasi dari Meja ke Meja**



Gambar 8. Siti Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito
Sumber: koleksi Nyi Suratmi Iman Sudiyat

Nyi Siti Sukaptinah lahir di Yogyakarta, 28 Desember 1907. Ayahnya adalah seorang juru tulis keraton Yogyakarta bernama R. Sastrawecana. Ia merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Kedua adiknya laki-laki, yaitu Haryomulyono (R. Prawiroharyono) (1909-1986) dan Ki Hertog (1914-1986) (Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa 1996, hh. 143-144.) Sebelum masuk ke Tamansiswa ia menempuh pendidikan di HIS Keputran pada tahun 1914. Sekolah tersebut didirikan oleh Sultan Hamengku Buwono VII untuk anak-anak *abdi dalem* (Issom 2000, h. 37). Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikannya ke MULO tahun 1922. Sang ayah memiliki rencana lain. Ia hanya mengizinkan anak gadisnya bekerja jika sebagai guru. Siti Sukaptinah pun mengikuti permintaan sang

ayah. Iapindah ke Taman Guru, Tamansiswa Yogyakarta tahun 1924.

Di Tamansiswa Siti Sukaptinah cukup dekat dengan Nyi Hajar Dewantara. Ia juga aktif dalam pergerakan perempuan. Mewakili JIBDA (Jong Islamieten-Bond Dames-Afdeling) Yogyakarta, sayap perempuan dari Sarekat Islam, ia dapat turut serta dalam Kongres Perempuan Indonesia I 1928. Saat itu ia bertugas sebagai penulis dalam kongres (Panitia Pembuatan Buku 2009, h. 71). Ia juga menciptakan "Panembrama: Kinanthi Sekar Gending Srikastawa: Ladrang Pelog Barang" untuk kongres tersebut (Suratmin & Sutjiatiningsih 1991, h. 33). Siti Sukaptinah ternyata tidak menaruh minat dalam dunia pendidikan. Setelah lulus dan sempat mengajar sebentar di Tamansiswa, ia menikah dengan teman sekolahnya, Sunaryo Mangunpuspito. Ia pun hijrah ke Jakarta mengikuti suaminya pada tahun 1929. Di Jakarta ia lebih fokus pada karier politik, keluarga dan kegiatan berorganisasinya.

Berdasarkan *memorie van toelichting*, melalui *Volksraad* awal tahun 1938, pemerintah memberikan hak pemilihan pasif bagi para perempuan segala bangsa untuk duduk dalam *raad* (pemerintah kota) (Issom 2007, h. 80). Hal tersebut dilihat oleh Nyi Siti Sukaptinah sebagai salah satu peluang bagi para perempuan untuk menyampaikan aspirasinya lewat kursi pemerintahan. Melalui keputusan Kongres Istri Indonesia ke-3, 11-15 Juni 1938 di Gedung Asrama Tamansiswa, Siti Sukaptinah ditunjuk sebagai ketua dan memperjuangkan perwakilan Istri Indonesia dalam pemilihan *Gemente Raad*. Selain itu, atas usulannya tanggal 22 Desember ditetapkan sebagai Hari Ibu.

Setelah melalui proses yang cukup panjang dalam pemilihan *Gemente Raad*, usaha tersebut membuahkan hasil. Atas kerja sama Istri Indonesia dan organisasi perempuan lainnya, Nyi Siti Sukaptinah terpilih sebagai wakil *Gemente Raad* Semarang pada 1938. Dalam masalah politik, Nyi Sukaptinah memang memiliki strategi simbiosis mutualisme. Ia selalu memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh pihak lawan untuk membangun kekuatan dalam menyejahterakan perempuan dan bangsa Indonesia. Tindakan yang dilakukan Nyi Sukaptinah tersebut jelas berbeda dengan sikap yang ditunjukkan oleh teman satu angkatannya di Tamansiswa, Nyi Sri Mangunsarkoro.

Sikap kooperatif Sukaptinah terhadap pihak lawan terus ia lakukan di masa pendudukan Jepang hingga kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1944-1945, ia menjadi ketua Fujinkai, organisasi perempuan bentukan Jepang (Issom 2007, h. 80, hh. 100-102). Pada Kongres

KOWANI yang ketiga di Magelang 14-16 Juli 1946, Nyi Siti Sukaptinah terpilih sebagai ketua (de Stuers 2008, h. 176). Ia juga mewakili KOWANI di Madras dalam All Indian Women's Conference pada bulan Desember 1947 (Issom 2008, h. 59). Dalam bidang politik, Nyi Siti Sukaptinah sempat menjadi anggota DPRS pada tahun 1950-1955. Ia juga menjadi Ketua Umum PB Muslimat Masyumi pada tahun 1951-1960. Pada pemilu 1955, nasib baik justru dimiliki oleh Nyi Siti Sukaptinah. Ia terpilih dalam pemilu tersebut dan menjadi perempuan satu-satunya yang dapat duduk di DPR RI dan merangkap sebagai anggota konstituante. Tahun 1956 ia mengikuti perlawatan Delegasi Parlemen RI ke negara-negara sosialis, Roma dan Libanon (Issom 2008, h. 128).

Nyi Siti Sukaptinah meninggal pada 31 Agustus 1991 di Yogyakarta. Dalam hidupnya ia membuktikan bahwa perjuangan perempuan dapat dilakukan dalam berbagai cara. Dari meja ke meja, ia menyuarakan ide-idenya untuk kemajuan perempuan dan bangsanya. Perlawanan baginya tidak selalu menyerang musuh secara langsung. Ia memilih untuk menyusun berbagai strategi agar suaranya sebagai "ibu bangsa" tetap dapat terdengar dalam medan perjuangan.

Penutup

Situasi politik dan sosial di Jawa akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 membawa perubahan dalam kehidupan para perempuan priayi. Peran gender semakin menguat akibat pengaruh dari sistem tradisional masyarakat Jawa ditambah pengaruh dari Barat. Para gadis terus-menerus didoktrin untuk menjadi ibu bagi keluarga dan masyarakatnya. Hal tersebut terus-menerus dilakukan dari generasi ke generasi melalui pendidikan formal hingga adat istiadat. Masa pergerakan nasional memunculkan kesadaran baru dalam kehidupan para gadis. Hal-hal yang dikonstruksikan kepada mereka sebagai kodrat digunakan untuk mendobrak sekat domestik-publik yang telah dikonstruksikan. Sebagai seorang "Ibu Bangsa", mereka berjuang dengan cara yang beragam seperti Srikandi dan Sumbadra: berjuang dalam bidang pendidikan, hadir dalam kongres-kongres, serta aktif dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Sayangnya, perjuangan para "Ibu Bangsa" mengalami kemunduran pasca Orde Baru. *Ibuism* pada masa itu tidak lagi muncul dari semangat dan kesadaran para perempuan untuk berpartisipasi dalam kemajuan bangsanya. *Ibuism* pada masa Orde Baru merupakan dominasi negara terhadap perempuan dengan standar peran yang telah diciptakan melalui organisasi

perempuan yang dibentuknya, yaitu PKK dan Dharma Wanita. Melalui organisasi dan program-program yang dijalankan, negara yang patriarkal mereduksi peran perempuan, melakukan domestikasi perempuan melalui program-program yang disusun demi mencapai stabilitas negara.

Daftar Pustaka

- Andrianie, K 2004, *Konsep Pernikahan dalam Serat Piwulang Estri*, skripsi, Ilmu Sastra Nusantara Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Astuti, D 2003, *Sri Mangunsarkoro: Tokoh Pergerakan Perempuan Indonesia 1924-1945*, skripsi, Jurusan Sejarah FIB, Universitas Indonesia, Depok.
- Blackburn, S 2007, *Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang*, Yayasan Obor Indonesia & KITLV Jakarta, Jakarta.
- "Daftar Anggota Perguruan Taman Siswa Di Madjelis Luhur dan Tjabang2/Persiapan/Tjabang/Kandidat Persiapan Tjabang Taman Siswa Di Daerah Djawa Tengah Jang Dikenakan Penindakan" 1965, *Poesara*, September-Desember, h. 18.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 1977, *Pendidikan di Indonesia 1900-1940: Kebijaksanaan Pendidikan di Hindia Belanda 1900-1942*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Dewantara, BS 1979, *Nyi Hajar Dewantara dalam Kisah dan Data*, Gunung Agung, Jakarta.
- Dewantara, KH 1931, "Wanita Taman-Siswa. *Vrouwenraad* dalam Taman-Siswa", *Poesara*, November, h. 21-22.
- Dewantara, KH 1935, "Perempuan di dalam Pertumbuhan Adab", *Wasita*, Juli, tahun I No. 6.
- Djajadiningrat-Nieuwenhuis, M 1987, "Ibusim and Priyayisation: Path to Power?", dalam E Locher-Scholten & A Niehof, *Indonesian Women in Focus*, KITLV, Leiden.
- Gouda, F 2007, *Dutch Culture Overseas: Praktik Kolonial di Hindia Belanda 1900-1942*, Serambi, Jakarta.
- Handayani, C & Novianto, A 2011, *Kuasa Wanita Jawa*, LkiS, Yogyakarta.
- Issom, SS 2000, *Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito: Sosok Wanita Pergerakan Indonesia (1928-1956)*, tesis, Pascasarjana Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Depok.
- Kartini, R.A. 2014, *Emansipasi: Surat-surat kepada Bangsanya 1899-1904*, Jalasutra, Yogyakarta.
- Kartodirdjo, S, Sudewo, A & Hatmosuprobo 1987, *Perkembangan Peradaban Priyayi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Kementerian Penerangan Republik Indonesia 1950, *Kepartaian di Indonesia*, Kementerian Penerangan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kuntowijoyo 2004, *Raja, Priyayi dan Kawula: Surakarta 1900-1915*, Ombak, Yogyakarta.

Locher-Scholten, E 2000, "Colonial Ambivalencies: European Attitudes towards the Javanese Household (1900-1942)", dalam J Koning, M Nolten, J Rodenberg & R Saptari (eds.), *Women and Households in Indonesia: Cultural Notions and Social Practices*, Curzon.

Lubis, NH 2007, *Kajian Tentang Perjuangan Raden Ayu Lasminingrat: Dalam Rangka Pengusulannya sebagai Pahlawan Nasional*, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung.

Madjelis Luhur Persatuan Tamansiswa 1961, *Karja Ki Hadjar Dewantara*, Madjelis Luhur Persatuan Tamansiswa, Yogyakarta.

Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa 1996, *Mengenal Taman Wijayabrata, Makam Pahlawan Pejuang Bangsa*, Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa & PT. BP. Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta.

Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa 2013, *Ki Hajar Dewantara: Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka (Bagian II Kebudayaan)*, UST Press, Yogyakarta.

Mangoensarkoro, NS 1931, "Pendidikan Anak Perempoean", dalam *Poesara*, Oktober, h. 6-9.

Mangoensarkoro, NS 1932, "Mengapa Wanita Taman Siswa Haroes Diatoer?", *Poesara*, 1 Januari, h. 88.

Mangoensarkoro, NS 1933, "Pembitjaraan tentang: 'Wanita Taman Siswa', pada 'Rapat Iboe' T.S. Djakarta Djatibaroeh", dalam *Poesara*, Juni. h. 133.

Mangoensarkoro, NS 1934a, "Meninggikan Derajat 'Roemah Tangga'", dalam *Poesara*, 2 Februari, h. 71.

Mangoensarkoro, NS 1934b, "So'al Polygami", dalam *Poesara*, Agustus, h. 152-154.

Mangoensarkoro, NS 1935, "Arti Perempoean Sebagai Iboe Bangsa", dalam *Wasita*, April, h. 129-130.

Ningrum, SUD 2017, *Menjadi Priyayi Jawa: Sejarah Wanita Tamansiswa, 1920an – 1960an*, tesis, S2 Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Nordholt, HS 2002, *Kriminalitas, Modernitas dan Identitas dalam Sejarah Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Panitia Pembuatan Buku 2009, *80 Tahun Kowani, Derap Langkah Pergerakan Organisasi Perempuan Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

"Perajaan Windon Wisma-Rini Mataram" 1932, *Poesara*, Mei, h. 60.

"Peratoeran Besar Wanita Tamansiswa" 1939, *Poesara*, Maret, h. 59.

"Poligamie bij de inheemsche bevolking" (Poligami pada masyarakat pribumi) 1930, dalam Departement van Economische Zaken, *Volkstelling*.

Scherer, S 2012, *Keselarasan dan Kejanggalan: Pemikiran-pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa awal Abad XX*, Komunitas Bambu, Jakarta.

Suratmin & Sutjiatiningsih 1991, *Biografi Tokoh Kongres Perempuan Indonesia Pertama*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Jakarta.

De Stuers, CV 2008, *Sejarah Perempuan Indonesia, Gerakan dan Pencapaian*, Komunitas Bambu, Jakarta.

Wanita Tamansiswa 1990, *Seratus Tahun Nyi Hadjar Dewantara*, Percetakan Offset Tamansiswa, Yogyakarta.

W.T.S. Djakarta 1934, "Kepandoean Sebagai Alat Pendidikan Anak Perempoean", *Poesara*, Maret, h. 87.

Catatan Akhir

- 1 Masyarakat Jawa terbagi dalam tiga strata sosial, yaitu Raja, priayi dan kawula dengan kehidupan yang berbeda-beda. Dalam hal ini, priayi merupakan kelas menengah. Awalnya mereka terdiri dari kerabat raja keturunan bangsawan dan bukan bangsawan yang bekerja sebagai pegawai-pegawai raja (Kuntowijoyo 2004).
- 2 Dalam keluarga priayi, perempuan memiliki peran sentral. Ia adalah pengasuh utama bagi anak-anaknya, sehingga dialah yang mampu mereproduksi budaya priayi dan menentukan kepriyayan seseorang. Contohnya ialah anak yang lahir dari ibu keturunan priayi akan dididik sebagai seorang priayi, seperti dalam berbicara, berpakaian, berperilaku, dan lain sebagainya (Djajadiningrat-Nieuwenhuis 1987, h. 43-44).
- 3 *Sakola Isteri* didirikan oleh R.A. Dewi Sartika, putri Patih Bandung Raden Ranga Somanegara pada 16 Januari 1904 di kota Bandung atas bantuan R.A. Lasminingrat dan suami R.A.A. Wiratanudatar VIII serta Inspektur C Den Hamer dan persetujuan Bupati Bandung. *Sakola Kautamaan Istri* didirikan oleh R.A. Lasminingrat tahun 1907 di pendopo kabupaten Garut dan baru diresmikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada 12 Februari 1913 dan membuka cabang di Garut dan sekitarnya (Lubis 2007, h. 17-21).
- 4 Nama gadis dari Nyi Sri Mangunsarkoro memiliki banyak versi. Di dalam buku *Mengenal Taman Wijayabrata, Makam Pahlawan Pejuang Bangsa* disebutkan nama gadis Sri Mangunsarkoro adalah Sri Sulandari/Sri Wulandari (Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa 1996). Berbeda dengan buku tersebut, skripsi Dewi Astuti yang berjudul *Sri Mangunsarkoro: Tokoh Pergerakan Perempuan Indonesia 1924-1945* menyebut nama gadis Nyi Sri Mangunsarkoro dengan Sri Sulandri [sic] (Astuti 2003, h. 55). Di dalam arsip Museum Dewantara Kirti Griya Taman Siswa, nama gadis Nyi Sri Mangunsarkoro ditulis Sri Sulandari. Nama Sri Sulandari juga digunakan oleh penulis dalam tesisnya yang berjudul *Menjadi Priyayi Jawa: Sejarah Wanita Tamansiswa, 1920an – 1960an*. Berdasarkan rujukan sumber-sumber tersebut, maka untuk penyebutan nama gadis dari Nyi Sri Mangunsarkoro dalam tulisan ini ialah Sri Sulandari.
- 5 Organisasi politik tersebut didirikan oleh Tan Malaka pada 16 Januari 1946 untuk mencapai Indonesia merdeka 100% (Astuti 2003, h. 110-111).

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)
2. Prof. Sylvia Tiwon (University of California, Berkeley)
3. Prof. Dr. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah)
4. Yacinta Kurniasih, M.A. (Monash University)
5. Soe Tjen Marching, Ph.D. (SOAS University of London)
6. Dr. Atnike Nova Sigiro (Universitas Paramadina)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kuarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689

